

Pendidikan Islam dan Kebangkitan Cendekia Muslim Indonesia

Author:

¹Noprijon
²Duski Samad
³Firdaus

Affiliation:

STAI YPPTI
Balaiselasa Pesisir
Selatan Indonesia¹
Universitas Islam
Negeri Imam Bonjol
Padang Indonesia^{2,3}

Corresponding email:

noprijon06@staibalaise.lasa.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 2025-07-07
Accepted: 2025-07-28
Published: 2025-07-28



This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License

Abstrak:

Cendekiawan muslim memiliki peran yang cukup signifikan dalam menjaga kondisi perkembangan Islam dan mendidik umat Islam yang kokoh. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk pada tahun 1990 untuk menghimpun dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dalam rangka menggali referensi tentang perjalanan panjang pendidikan Islam dan kebangkitan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI) serta fungsi cendekiawan muslim. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia telah berfungsi secara menyeluruh hingga ke pelosok tanah air, kontribusinya tidak diragukan lagi, disamping itu pendidikan Islam dan cendekiawan muslim telah melahirkan berbagai pemikiran di tengah-tengah masyarakat serta menjadi penyumbang pemikiran yang luas terkait dengan kehidupan dalam masyarakat Islam karena lahirnya ICMI) diantaranya ketidakpuasan masyarakat Islam terhadap gerakan Orde Baru, keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan politik kebangsaan, dan perbedaan pendapat di kalangan cendekiawan muslim terhadap pembaharuan pemikiran keagamaan. (ICMI) menjadi wadah bagi para ulama untuk berkumpul dalam diskusi guna bertukar ide-ide cemerlang, memberi mereka akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik, meningkatkan pemikiran masyarakat tentang fungsi ulama, dan mengajak masyarakat untuk turut membangun negara. Dari kisah berdirinya (ICMI), kita dapat memetik pengalaman betapa urgennya ulama dalam membangun peradaban bangsa, berkolaborasi dalam pemerintahan, melestarikan ormas dalam kritik politik, dan terus menyegarkan tokoh agama Islam.

Kata kunci: Islamic Revival; Indonesian Muslim; Scholars

Pendahuluan

Perkembangan intelektual Muslim Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lahirnya komunitas pemikir yang memiliki komitmen terhadap kemajuan umat. B.J. Habibie, misalnya, memaknai kata *ulama* secara luas sebagai “setiap orang yang peduli terhadap penderitaan manusia dan memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat” (Pranata, 2023). Dalam pandangan tersebut, kebangkitan ulama modern ditandai dengan fokus pada lima aspek utama, yaitu kualitas iman dan takwa, kualitas berpikir, kualitas kerja, kualitas karya, dan kualitas hidup (*5-K*). Kebangkitan para ulama dan cendekia Muslim ini menjadi pondasi penting dalam pembangunan peradaban Islam Indonesia yang inklusif dan progresif. Namun demikian, dalam jangka panjang, munculnya beragam tipe pemimpin dan visi keislaman akan diuji oleh kemampuan kepemimpinan Muslim kontemporer dalam menjawab tuntutan zaman dan memfasilitasi integrasi umat ke dalam kehidupan kebangsaan (Pranata, 2023).

Sejarah mencatat bahwa perkembangan Islam di Indonesia mengalami fase-fase penting dalam dimensi ilmu pengetahuan maupun kelembagaan. Pendidikan Islam, khususnya pendidikan tinggi, memainkan peran sentral sebagai institusi kaderisasi intelektual Muslim yang memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang luas, serta memiliki daya saing global (Iswantir, 2019). Oleh karena itu, dalam rangka

meningkatkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan Islam, penyempurnaan paradigma keilmuan yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan Islam menjadi sangat penting dan mendesak (Iswantir, 2019).

Perjalanan panjang pendidikan tinggi Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam tiga periode utama. Pertama, periode awal yang berakar pada lembaga tradisional seperti pesantren, dayah, surau, dan masjid. Kedua, periode pembaruan pemikiran Islam pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan lahirnya madrasah dengan kurikulum terpadu antara ilmu keislaman dan ilmu umum. Ketiga, periode integrasi pendidikan tinggi Islam ke dalam sistem pendidikan nasional pasca-kemerdekaan yang menandai adaptasi pendidikan Islam terhadap dinamika nasional dan global (Darmadi et al., 2000).

Dalam konteks pengelolaan, pendidikan Islam dituntut untuk memiliki kedalaman normatif dan ketajaman visi. Menurut Malik Fadjar, kedalaman normatif diperlukan agar manajemen pendidikan mampu merumuskan secara mendasar tipe manusia ideal yang hendak dihasilkan. Sementara itu, ketajaman visi menjadi kunci agar lembaga pendidikan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman (Iswantir, 2019). Pendidikan Islam juga dipahami sebagai sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan realitas sosial-budaya, sehingga para pengelola pendidikan perlu bersikap inklusif dan inovatif dalam menghadapi tantangan global. Dengan pendekatan tersebut, lembaga pendidikan diharapkan menjadi pusat lahirnya ilmuwan dan cendekia Muslim modern yang berpengaruh (Abrori & Nurkholis, 2019).

Studi Literatur

Jurnal yang ditulis oleh Nur Rohman dengan judul Pendidikan Islam dalam Membangun Peradaban: Refleksi Peran Intelektual Muslim Indonesia yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2, 202 Artikel ini membahas tentang peran strategis pendidikan Islam dalam kebangkitan intelektual muslim di Indonesia. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana transformasi nilai-nilai Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid, Harun Nasution, dan Quraish Shihab merupakan produk sistem pendidikan Islam modern yang berakar kuat pada tradisi klasik tetapi terbuka terhadap modernitas.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Rahmawati yang dimuat dalam Jurnal: Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 14, No. 1, 2019 dengan judul Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Mencetak Intelektual Muslim Indonesia: Kajian Historis dan Kontekstual: Artikel ini mengkaji kontribusi lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam, dalam mencetak intelektual muslim di Indonesia. Dengan pendekatan historis, penulis menganalisis peran lembaga seperti Al-Irsyad, Muhammadiyah, NU, dan UIN dalam mendidik kader intelektual Islam yang berpengaruh di ranah akademik dan sosial politik.

Novelty dari kajian ini terletak pada tawaran pendekatan baru yang tidak hanya melihat pendidikan Islam dari sisi historis atau tokoh-tokohnya, melainkan dari sudut pandang ekosistem pengetahuan Islam yang lebih luas dan kontemporer. Penelitian lanjutan perlu memetakan hubungan antara aktor (cendekia), lembaga (pendidikan Islam), teks (pemikiran), dan platform digital (media sosial, podcast, jurnal daring) yang membentuk sirkulasi wacana intelektual Muslim di Indonesia masa kini. Selain itu, perlu dilakukan integrasi antara pendekatan historis, bibliometrik, dan social network analysis (SNA) untuk mengukur dampak nyata para intelektual Muslim terhadap wacana publik, kebijakan, dan pembentukan identitas keislaman modern. Kebaruan lainnya adalah perlunya pembacaan ulang kurikulum pendidikan Islam melalui hibridisasi antara khazanah klasik (turats) dengan teori-teori kontemporer seperti post-sekularisme dan dekolonisasi pengetahuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya merekonstruksi peran pendidikan Islam dalam sejarah kebangkitan cendekiawan Muslim, tetapi juga menawarkan model baru dalam menyiapkan generasi intelektual Muslim yang relevan dengan tantangan zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam referensi-referensi ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, kebangkitan ulama dan intelektual Muslim, serta kontribusi lembaga seperti *Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)* dalam memajukan pemikiran Islam modern.

Hasil

1. Pendidikan Islam dan kebangkitan Cendekiawan di Indonesia

a. Pendidikan Islam

Proses pendidikan sesungguhnya telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial budaya manusia di permukaan bumi, karena manusia menghendaki kemajuan dalam kehidupan, maka sejak saat itu timbul gagasan untuk melakukan pemindahan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan melalui pendidikan. Dalam sejarah pertumbuhan masyarakat, pendidikan senantiasa menjadi perhatian utama guna memajukan kehidupan generasi-generasi seiring dengan tuntutan kemajuan sosial budaya. Idi, (Abdullah. 2015). Pendidikan Islam telah menjadi prioritas utama bagi masyarakat muslim sejak awal perkembangan Islam. Hal ini sejalan dengan kegiatan pendidikan Islam yang lahir dan tumbuh seiring dengan perkembangan Islam di Indonesia. (Latif, Yudi. 2012.) Di samping makna pendidikan yang begitu besar, kepentingan Islamisasi memegang peranan besar dalam mendorong umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam meskipun dengan sistem yang sederhana dan dilakukan secara informal. Hal ini dikarenakan Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim, sambil berdagang mereka menyebarkan agama Islam dan setiap ada kesempatan mereka memberikan pendidikan dan ajaran Islam. Pendidikan di Indonesia selama ini berjalan secara dualistik (umum dan agama), terjadi pemisahan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Hal ini terjadi sejak pemerintah kolonial Belanda memberlakukan sistem pendidikan sekuler, sedangkan pendidikan Islam yang diwakili oleh pondok pesantren kurang memperhatikan ilmu pengetahuan umum, hingga Indonesia (Harahap, S. (1998).

Kemerdekaan, meskipun pada awal kemerdekaan masih mewarisi sistem pendidikan dualistik. Pendidikan Islam di Indonesia dalam sejarahnya yang panjang, mulai dari masa penjajahan hingga Indonesia merdeka menghadapi berbagai permasalahan dan kesenjangan dalam berbagai aspek, berupa permasalahan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, dan manajemen pendidikan Islam. Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan telah menjadi prioritas utama bagi masyarakat muslim Indonesia, di samping besarnya makna pendidikan, kepentingan Islamisasi telah mendorong umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam meskipun dalam sistem yang sangat sederhana, dimana pengajaran diberikan dengan sistem halaqah yang dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushola, bahkan di rumah-rumah ulama. Kebutuhan akan pendidikan telah mendorong masyarakat Islam di Indonesia untuk mengadopsi dan mengalihkan lembaga-lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada (lembaga keagamaan dan sosial adat) ke dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Jawa, umat Islam mengalihkan lembaga-lembaga keagamaan Hindu-Budha ke dalam pondok pesantren, umat Islam di Minangkabau mengambil alih surau sebagai warisan adat masyarakat (Nirwana, D. (2014).) Pada awal abad ke-20, madrasah dengan sistem kelas (klasik) mulai muncul di Indonesia. Menurut penelitian Mahmud Yunus, pendidikan Islam pertama yang memiliki kelas dan menggunakan bangku, meja, dan papan tulis adalah Madrasah Adabiyah (Sekolah Adabiyah) di Padang. Madrasah Adabiyah merupakan madrasah pertama di Miangkabau, bahkan di Indonesia, yang didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Madrasah ini bertahan hingga tahun 1914, kemudian diubah menjadi HIS Adabiyah pada tahun 1915, yang merupakan HIS pertama di Miangkabau yang memasukkan pelajaran agama Islam dalam pengajarannya. (Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, t.t.) Munculnya sekolah-sekolah Islam yang terintegrasi

dengan sistem pendidikan modern juga tidak terlepas dari banyaknya alumni Universitas Al-Azhar di Mesir yang telah menyelesaikan pendidikannya di sana. Mereka merupakan hasil dari sistem pendidikan yang telah direformasi oleh Muhammad Abduh. Setibanya di Indonesia, mereka mengelola dan mengajar di sekolah-sekolah agama dan mencakup mata pelajaran umum. Lembaga pendidikan tersebut diberi nama Madrasah Guru Islam atau Sekolah Menengah Islam (SMI). Di antara madrasah-madrasah yang juga termasuk lebih awal adalah Al-Jami'ah Islamiyah, di Sungayang Batusangkar, yang didirikan oleh Mahmud Yunus pada tanggal 20 Maret 1931; Normal Islam (Kuliah Mu'allim Islamiah), yang didirikan oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) di Padang pada tanggal 1 April 1931 dan dipimpin oleh Mahmud Yunus, dengan demikian Mahmud Yunus memimpin dua madrasah tingkat menengah dan tinggi di atasnya. Terlebih lagi Perguruan Tinggi Islam yang didirikan oleh Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) di Padang pada tanggal 1 Mei 1931 yang dipimpin oleh Tn. Abdul Hakim. Kemudian digantikan oleh Mukhtar Yahya pada tahun 1935. Di Sulawesi Selatan pada umumnya raja-raja memberikan keleluasaan kepada para pendakwah dan ulama serta pendidik untuk mengembangkan dakwah Islam dan pendidikan. Raja Gowa yang bergelar Imangimangi Daeng Matuju Karaeng Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin (1936 - 1946) memprakarsai pembukaan Madrasah Islamiyah yang berlokasi di Jongaya, Gowa. Pengajaran Islam yang diberikan berlandaskan pada madzhab Syafi'i. Kepemimpinan Madrasah tersebut dijabat oleh Asy Syekh Abdullah bin Shadaqah Dahlan, seorang ulama yang taat beragama.

b. Kebangkitan cendekiawan muslim di Indonesia

Bangkitnya Intelektual Muslim di Indonesia Istilah intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk berkarya, mengkaji, membayangkan, menggagas, dan menjawab pertanyaan tentang berbagai gagasan. Fungsi utama seorang "ulama" bukan sekadar memikirkan kebenaran tetapi harus menyuarakannya, apa pun rintangannya. Seorang intelektual sejati tidak boleh bersikap netral, dan harus berpihak pada kebenaran dan keadilan. Sementara itu, intelektual dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah "orang yang memiliki sikap hidup yang terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu". Dapat disimpulkan bahwa orang yang senantiasa berpikir untuk menyampaikan kebenaran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan demi terciptanya keselamatan bersama adalah seorang intelektual. Sementara itu, yang dimaksud dengan intelektual muslim adalah orang yang berpikir benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits untuk kemaslahatan umat manusia. Sejak pertengahan tahun 1980-an, dominasi golongan abangan mulai menurun dan hegemoni kaum santri mulai menguat. Lonceng kematian dominasi kaum abangan Jawa dalam birokrasi Orde Baru kemudian "dibunyikan" sendiri oleh Presiden Soeharto yang sebelumnya dikenal sebagai kaum abangan dan jauh dari adat keislaman, pada 6 Desember 1990, saat meresmikan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Berdirinya ICMI terbilang fenomenal. Beragam tanggapan dan komentar bermunculan seputar berdirinya ICMI. Bagi para cendekiawan seperti Robert Hefner, Nakamura, Douglas Ramage, dan Arief Budiman, kemudian juga para pendukung dan aktivis ICMI yakni Kuntowijoyo, Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Imaduddin Abdulrahim, dan Amien Rais, ICMI merupakan simbol kebangkitan politik Islam dan pintu gerbang bagi umat Islam saat itu untuk bisa berperan di pusat kekuasaan setelah sekian lama terpinggirkan. Namun bagi yang lain, yang dikenal sebagai analis sekuler, seperti Abdurrahman Wahid dan William Liddle, ICMI tidak lebih dari sekadar bentuk kooptasi Soeharto terhadap kelompok Islam yang sedang naik daun demi tujuan politiknya, yaitu pemilu 1992. Bagi Wahid dan Liddle, ketika Soeharto kembali menjadi presiden untuk masa jabatan berikutnya, ICMI akan ditinggalkan dan kehilangan kekuasaannya. Bagi kelompok ini, ICMI merupakan wahana bagi kepentingan politik Bangkitnya Intelektual Muslim di Indonesia Istilah intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk berkarya, mengkaji, membayangkan, menggagas, dan menjawab pertanyaan tentang berbagai gagasan. Fungsi utama seorang "ulama" bukan sekadar memikirkan kebenaran tetapi harus

menyuarakannya, apa pun rintangannya. Seorang intelektual sejati tidak boleh bersikap netral, dan harus berpihak pada kebenaran dan keadilan. Sementara itu, intelektual dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah "orang yang memiliki sikap hidup yang terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu". Dapat disimpulkan bahwa orang yang senantiasa berpikir untuk menyampaikan kebenaran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan demi terciptanya keselamatan bersama adalah seorang intelektual. Sementara itu, yang dimaksud dengan intelektual muslim adalah orang yang berpikir benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits untuk kemaslahatan umat manusia. Sejak pertengahan tahun 1980-an, dominasi golongan abangan mulai menurun dan hegemoni kaum santri mulai menguat. Lonceng kematian dominasi kaum abangan Jawa dalam birokrasi Orde Baru kemudian "dibunyikan" sendiri oleh Presiden Soeharto yang sebelumnya dikenal sebagai kaum abangan dan jauh dari adat keislaman, pada 6 Desember 1990, saat meresmikan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Berdirinya ICMI terbilang fenomenal. Beragam tanggapan dan komentar bermunculan seputar berdirinya ICMI. Bagi para cendekiawan seperti Robert Hefner, Nakamura, Douglas Ramage, dan Arief Budiman, kemudian juga para pendukung dan aktivis ICMI yakni Kuntowijoyo, Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, Imaduddin Abdulrahim, dan Amien Rais, ICMI merupakan simbol kebangkitan politik Islam dan pintu gerbang bagi umat Islam saat itu untuk bisa berperan di pusat kekuasaan setelah sekian lama terpinggirkan. Namun bagi yang lain, yang dikenal sebagai analis sekuler, seperti Abdurrahman Wahid dan William Liddle, ICMI tidak lebih dari sekadar bentuk kooptasi Soeharto terhadap kelompok Islam yang sedang naik daun demi tujuan politiknya, yaitu pemilu 1992. Bagi Wahid dan Liddle, ketika Soeharto kembali menjadi presiden untuk masa jabatan berikutnya, ICMI akan ditinggalkan dan kehilangan kekuasaannya. Bagi kelompok ini, ICMI merupakan wahana bagi kepentingan politik

Pembahasan

a. Cendekiawan Muslim Indonesia

Kelahiran ulama muslim baru muncul pada pertengahan tahun 1930-an. Dahulu, „ulama muslim“ disebut sebagai „orang terpelajar“ atau „golongan terpelajar“. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, „ulama“ memiliki arti sebagai berikut: pandai, cendekiawan/cerdik, ilmuwan, cendekiawan, sarjana, cendekiawan, penulis. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti yang lebih singkat kepada „ulama“, yaitu „cendekiawan yang pandai; orang yang cerdas, pandai; orang yang berilmu“. KBBI mengurai kata „ulama“ secara lebih rinci: 1) berpikiran tajam, cepat mengerti (jika diberi tahu sesuatu); cerdas; pandai; 2) cepat memahami keadaan dan pandai mencari jalan keluar (pandai memanfaatkan peluang); cerdik; licik; 3) terpelajar; pandai; pandai intelektual. Ulama memiliki daya pikir yang luas, keahlian khusus, daya pikir sistematis yang kritis dan memiliki watak yang adil dan benar. Pada dasarnya, ulama merupakan penafsir jalan hidup manusia. Jika dilihat dalam konteks umat Islam, ulama adalah orang yang pandai menafsirkan jalan hidup manusia. ulama, yaitu seseorang yang telah menjalani pendidikan formal maupun nonformal yang dengan keilmuannya mampu melihat, memaknai, menyikapi lingkungan dengan sikap kritis, kreatif, dan bertanggung jawab berdasarkan perspektif Islam. Keilmuan seseorang dapat dilihat dari pandangannya terhadap budaya, bagaimana mempertanyakan sistem budaya yang ada dan memikirkan apa yang seharusnya dilakukan. Yang membedakan ulama dengan cendekiawan muslim adalah para pemikir selalu mengalami kegelisahan intelektual dalam mempertanyakan Islam yang normatif dan skriptural yang tidak lagi mengalirkan pesan fundamentalnya ke era baru. Sementara ulama mempertahankan otoritas keagamaannya. Ulama yang melabeli dirinya dengan Islam merupakan sikap berpikir Islam, membuka kembali penafsiran Al-Qur'an, Al-hadits, hadis di tengah kompleksitas dan letak kehidupan manusia yang beragam. Jadi, ulama adalah orang-orang yang hidup dalam keimanan dan pemikirannya yang selalu berjuang melawan formalisme dan strukturalisme agama yang hanya menempatkan ritual sebagai rutinitas. Ulama tidak memandang perjuangan politik praktis untuk merebut kekuasaan sebagai jalan

perjuangan. Persoalan substantif umat Islam adalah transformasi budaya yang dapat dilakukan melalui pendidikan, peningkatan ekonomi, pembangunan masyarakat desa, peningkatan kesehatan dan berbagai upaya strategis lainnya. Transformasi budaya ini sangat relevan dengan semakin gencarnya bazaar ide dan budaya di era teknologi informasi yang mengimpor ideologi dan budaya yang telah merasuki celah-celah setiap masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Ulama muslim harus mampu memasuki perebutan ruang publik sebagai orang-orang yang beriman. Ulama yang memiliki pengetahuan umum dan pengetahuan tentang masyarakat. Ulama tidak boleh apolitis dan menganggap memasuki ranah politik seperti menjadi anggota dewan sebagai sesuatu yang tidak pantas bagi ulama. Dunia politik dalam hal ini DPR akan membaik kinerja dan citranya jika ulama mampu mewujudkan apa yang selama ini dibayangkannya sebagai sesuatu yang ideal dan selalu dikritik atas suatu masalah. Ulama dituntut untuk mewujudkan apa yang telah diperbincangkan dan melakukan terobosan-terobosan untuk memperbaiki aturan main yang berlaku. Ulama harus plus politik, yang memiliki sikap politik dalam kehidupannya, misalnya dalam bentuk pernyataan 'membela rakyat' dan tempat konkrit untuk membela rakyat adalah dengan menjadi anggota DPR. Generasi ketiga: Lafran Pane. Beliau merupakan pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 1947 di Yogya. HMI merupakan cikal bakal kaum intelektual muslim dari kalangan mahasiswa, saat itu HMI merupakan satu-satunya organisasi mahasiswa Islam yang ada di Pelajar Islam Indonesia (PII) saat itu. Kemudian fase angkatan keempat diikuti oleh tokoh-tokoh seperti Nurcholis Madjid, Imaduddin Abdulrahim, Djohan Effendi, Kuntowijoyo, dan Ahmad Wahib dari HMI. Kemudian ada Mahbub Djunaedi dari PMII, Dawam Rahardjo, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Amien Rais. Pada era tersebut terdapat dua gerakan kaum intelektual muslim: yang pertama lebih ke arah pembaharuan Islam dan ide-ide liberal yang dipelopori oleh Nurcholish Madjid dan juga kelompok diskusi terbatas Yogyakarta: Ahmad Wahib dan Djohan Effendi. Kemudian ada gerakan dakwah yang dimulai dari kampus sekuler yang dipelopori oleh Imaduddin Abdulrahim (Bang Imad) dari Masjid Salman ITB yang dikenal sebagai dasar lahirnya gerakan tarbiyah di kampus-kampus negeri di Indonesia. Gus Dur sendiri mengembangkan ide yang dikenal dengan "pribumi Islam". Fase generasi kelima: Hatta Radjasa (Salman ITB), Hidayat Nurwahid (Gerakan Tarbiyah) dan kaum intelektual NU dan IAIN: Masdar Farid Mas'udi dan Azyumardi Azra. Pada generasi ini, kelompok intelektual muslim mengalami karakter yang sangat pluralistik, terlihat dari hadirnya kelompok liberal hingga kelompok muslim fundamentalis.

b. Kontribusi Pendidikan Agama Islam Terhadap Kebangkitan Cendekiawan Muslim Di Indonesia

Kelahiran ulama muslim baru muncul pada pertengahan tahun 1930-an. Dahulu, „ulama muslim“ disebut sebagai „orang terpelajar“ atau „golongan terpelajar“. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, „ulama“ memiliki arti sebagai berikut: pandai, cendekiawan/cerdik, ilmuwan, cendekiawan, sarjana, cendekiawan, penulis. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti yang lebih singkat kepada „ulama“, yaitu „cendekiawan yang pandai; orang yang cerdas, pandai; orang yang berilmu“. KBBI mengurai kata „ulama“ secara lebih rinci: 1) berpikiran tajam, cepat mengerti (jika diberi tahu sesuatu); cerdas; pandai; 2) cepat memahami keadaan dan pandai mencari jalan keluar (pandai memanfaatkan peluang); cerdik; licik; 3) terpelajar; pandai; pandai intelektual. Ulama memiliki daya pikir yang luas, keahlian khusus, daya pikir sistematis yang kritis dan memiliki watak yang adil dan benar. Pada dasarnya, ulama merupakan penafsir jalan hidup manusia. Jika dilihat dalam konteks umat Islam, ulama adalah orang yang pandai menafsirkan jalan hidup manusia. Ulama, yaitu seseorang yang telah menjalani pendidikan formal maupun nonformal yang dengan keilmuannya mampu melihat, memaknai, menyikapi lingkungan dengan sikap kritis, kreatif, dan bertanggung jawab berdasarkan perspektif Islam. Keilmuan seseorang dapat dilihat dari pandangannya terhadap budaya, bagaimana mempertanyakan sistem budaya yang ada dan memikirkan apa yang seharusnya dilakukan. Yang membedakan ulama dengan cendekiawan muslim adalah para pemikir selalu mengalami kegelisahan

intelektual dalam mempertanyakan Islam yang normatif dan skriptural yang tidak lagi mengalirkan pesan fundamentalnya ke era baru. Sementara ulama mempertahankan otoritas keagamaannya. Ulama yang melabeli dirinya dengan Islam merupakan sikap berpikir Islam, membuka kembali penafsiran Al-Qur'an, Al-hadits, hadis di tengah kompleksitas dan letak kehidupan manusia yang beragam. Jadi, ulama adalah orang-orang yang hidup dalam keimanan dan pemikirannya yang selalu berjuang melawan formalisme dan strukturalisme agama yang hanya menempatkan ritual sebagai rutinitas. Ulama tidak memandang perjuangan politik praktis untuk merebut kekuasaan sebagai jalan perjuangan. Persoalan substantif umat Islam adalah transformasi budaya yang dapat dilakukan melalui pendidikan, peningkatan ekonomi, pembangunan masyarakat desa, peningkatan kesehatan dan berbagai upaya strategis lainnya. program. Transformasi budaya ini sangat relevan dengan semakin gencarnya bazaar ide dan budaya di era teknologi informasi yang mengimpor ideologi dan budaya yang telah merasuki celah-celah setiap masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Ulama muslim harus mampu memasuki perebutan ruang publik sebagai orang-orang yang beriman. Ulama yang memiliki pengetahuan umum dan pengetahuan tentang masyarakat. Ulama tidak boleh apolitis dan menganggap memasuki ranah politik seperti menjadi anggota dewan sebagai sesuatu yang tidak pantas bagi ulama. Dunia politik dalam hal ini DPR akan membaik kinerja dan citranya jika ulama mampu mewujudkan apa yang selama ini dibayangkannya sebagai sesuatu yang ideal dan selalu dikritik atas suatu masalah. Ulama dituntut untuk mewujudkan apa yang telah diperbincangkan dan melakukan terobosan-terobosan untuk memperbaiki aturan main yang berlaku. Ulama harus plus politik, yang memiliki sikap politik dalam kehidupannya, misalnya dalam bentuk pernyataan 'membela rakyat' dan tempat konkrit untuk membela rakyat adalah dengan menjadi anggota DPR. Generasi ketiga: Lafran Pane. Beliau merupakan pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 1947 di Yogya. HMI merupakan cikal bakal kaum intelektual muslim dari kalangan mahasiswa, saat itu HMI merupakan satu-satunya organisasi mahasiswa Islam yang ada di Pelajar Islam Indonesia (PII) saat itu. Kemudian fase angkatan keempat diikuti oleh tokoh-tokoh seperti Nurcholis Madjid, Imaduddin Abdulrahim, Djohan Effendi, Kuntowijoyo, dan Ahmad Wahib dari HMI. Kemudian ada Mahbub Djunaedi dari PMII, Dawam Rahardjo, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Amien Rais. Pada era tersebut terdapat dua gerakan kaum intelektual muslim: yang pertama lebih ke arah pembaharuan Islam dan ide-ide liberal yang dipelopori oleh Nurcholish Madjid dan juga kelompok diskusi terbatas Yogyakarta: Ahmad Wahib dan Djohan Effendi. Kemudian ada gerakan dakwah yang dimulai dari kampus sekuler yang dipelopori oleh Imaduddin Abdulrahim (Bang Imad) dari Masjid Salman ITB yang dikenal sebagai dasar lahirnya gerakan tarbiyah di kampus-kampus negeri di Indonesia. Gus Dur sendiri mengembangkan ide yang dikenal dengan "pribumi Islam". Fase generasi kelima: Hatta Radjasa (Salman ITB), Hidayat Nurwahid (Gerakan Tarbiyah) dan kaum intelektual NU dan IAIN: Masdar Farid Mas'udi dan Azyumardi Azra. Pada generasi ini, kelompok intelektual muslim mengalami karakter yang sangat pluralistik, terlihat dari hadirnya kelompok liberal hingga kelompok muslim fundamentalis.

c. Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Pengembangan Agama Islam

Upaya tokoh-tokoh Islam untuk meningkatkan kualitas umat melalui pendidikan telah berlangsung sejak awal abad ke-20 dan terus berkembang hingga kini. Salah satu bentuk konkrit dari upaya tersebut adalah berdirinya berbagai perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta, sebagai kelanjutan dari pondok pesantren, madrasah, dan lembaga keagamaan tradisional lainnya. Perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia telah mengalami transformasi dari aspek politik, sosial, budaya, hingga administratif. Indikator keberhasilan upaya tersebut dapat dilihat dari menjamurnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di seluruh Indonesia, dari daerah perkotaan hingga daerah terpencil, yang tersebar di bawah naungan Kementerian Agama dan yayasan-yayasan masyarakat (Kemenag RI, 2023). Kehadiran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Lembaga ini lahir dari cita-cita umat Islam untuk menghadirkan

sistem pendidikan Islam yang formal, modern, dan terpadu. Kelahiran IAIN tidak dapat dilepaskan dari upaya menghidupkan kembali peran pesantren dan madrasah yang terpinggirkan dalam arus modernisasi pendidikan pada masa kolonialisme (Azra, 1999 sipil).

Kesimpulan

Penyelenggaraan pendidikan Islam sebelum lahirnya lembaga-lembaga pendidikan formal telah melahirkan berbagai tokoh yang tergolong sebagai ulama. Mereka berperan besar dalam membentuk fondasi intelektual Islam yang berpengaruh di tengah masyarakat. Seiring waktu, munculnya lembaga pendidikan Islam—seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam—semakin memperkuat kontribusi pendidikan Islam dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam membina keimanan dan penguasaan ilmu pengetahuan secara seimbang.

Kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1990 di Malang menandai fase penting dalam peta perkembangan intelektual Muslim di Indonesia. Meskipun ICMI bukanlah partai politik, kehadirannya membawa dampak signifikan dalam konstelasi politik nasional karena beranggotakan tokoh-tokoh intelektual berpengaruh seperti B.J. Habibie, Imanuddin Abdurrahim, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, dan lainnya. Kehadiran ICMI bahkan sempat menimbulkan kekhawatiran pada rezim saat itu, namun figur Habibie menjadi jaminan bahwa ICMI tetap berada dalam koridor konstruktif terhadap pemerintah.

Terlepas dari pro dan kontra yang mengiringi pembentukannya, ICMI menjadi simbol kuat kebangkitan intelektual Muslim Indonesia pada akhir abad ke-20. Ia menandai babak baru dalam dinamika pemikiran Islam dan peran strategis kaum cendekia dalam wacana kebangsaan. Sejak awal abad ke-20 hingga tahun 2000-an, gerakan intelektual Islam di Indonesia telah menunjukkan keragaman pemikiran yang responsif terhadap perubahan zaman, memperlihatkan bahwa Islam di Indonesia mampu berdialog dengan modernitas dan kebangsaan secara konstruktif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sejarah pemikiran Islam, pendidikan Islam, dan sosiologi keislaman. Kajian ini memperkaya perspektif akademik mengenai kontribusi lembaga dan individu intelektual Muslim dalam membentuk arah peradaban Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menjadi pijakan penting bagi pengembangan paradigma keilmuan pendidikan Islam yang lebih adaptif terhadap tantangan global dan relevan dengan konteks kebangsaan.

Akhirnya, setelah berusaha menyusun dan memaparkan kajian historis-sosiologis mengenai kontribusi pendidikan Islam terhadap kebangkitan intelektual Muslim Indonesia, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, masukan, dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan karya ini di masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, peneliti, dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan pendidikan Islam yang berkemajuan dan berdaya saing.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, khususnya kepada dosen, narasumber, dan lembaga penelitian yang telah memberikan kontribusi dalam menyediakan data dan informasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan pejuang, khususnya STAI Balaiselasa Pesisir Selatan yang telah mendukung proses penelitian ini, semoga pengabdian kita menjadi amal jariyah di sisi Allah.

Referensi

Abdullah, M. A. (1995). *Falsafah kalam di era postmodernisme*. [Google Scholar].

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic studies di perguruan tinggi: Perguruan integratif-interkoneksi*. [Google Scholar].
- Abrori, M., & Nurkholis. (2019). *Manajemen pendidikan Islam berbasis nilai-nilai profetik*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Danandjaja, J. (2014). *Metode penelitian kepustakaan. Antropologi Indonesia*. [Google Scholar].
- Darmadi, D., Hidayat, K., & Zarkasyi, H. (2000). *Problem dan prospek IAIN: Ontologi pendidikan tinggi Islam*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI.
- Fridiyanto. (2017). *Kaum intelektual dalam catatan kaki kekuasaan*. Lampung: Gre Publishing.
- Hidayat, K., & Prasetyo, H. (Eds.). (2000). *Problem dan prospek IAIN: Antologi pendidikan tinggi Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama RI.
- Huda, N. (2015). *Sejarah sosial intelektual Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Idi, A. (2015). *Dinamika sosiologis Indonesia: Agama dan pendidikan dalam perubahan sosial*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Idris, M. (2008). *Pemberdayaan kualitas umat menuju masyarakat madani: Sebuah opsi memasuki masyarakat yang membebaskan*. Makassar: PPs UIN Makassar. [Google Scholar].
- Iswantir, M. (2017). Azyumardi Azra thinking about paradigm scientific and institutional and implications for the development of Islamic State University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. *Proceedings PANTUM KUIS Selangor, 1(1)*, 58–71. <http://repo.iainbukittinggi.ac.id/117/>
- Iswantir, M. (2019). *Pendidikan Islam: Sejarah, peran dan kontribusi dalam sistem pendidikan nasional*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Klasik, D. M., & Tengah, H. M. (2007). *Sejarah pemikiran dan peradaban Islam*. [Google Scholar].
- Latif, Y. (2012). *Intelegensia Muslim dan kuasa: Genealogi intelegensia Muslim Indonesia abad ke-20 (Edisi Digital)*. Jakarta: Abad Demokrasi.
- Mudzhar, M. A. (2000). Kedudukan UIN sebagai perguruan tinggi. Dalam K. Hidayat & H. Prasetyo (Eds.), *Problem dan prospek IAIN: Antologi pendidikan tinggi Islam* (hlm. xx–xx). Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI.
- Rahmawati, S. (2019). Peran lembaga pendidikan Islam dalam mencetak intelektual Muslim Indonesia: Kajian historis dan kontekstual. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, 14(1)*, xx–xx.
- Rofi, S. (2016). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. [Google Scholar].
- Rohman, N. (2022). Pendidikan Islam dalam membangun peradaban: Refleksi peran intelektual Muslim Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam, 6(2)*, xx–xx.
- Sari, R. M. (2016). Perguruan tinggi Islam dan transformasi lembaga: Studi terhadap proses perubahan fungsi dan peran IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi universitas Islam. *El-Hekam, 1(1)*, 1–18. <https://doi.org/10.31958/jeh.v1i1.334>
- Sunanto, M. (2007). *Sejarah Islam klasik: Perkembangan ilmu pengetahuan Islam*. [Google Scholar].